

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Jakarta Terbentur Regulasi

## Status BLUD, Akali RS tanpa Kelas

JAKARTA-Jika di sejumlah daerah sudah menerapkan konsep rumah sakit (RS) tanpa kelas, namun berbeda dengan DKI Jakarta. Meski sebagai ibu kota negara, namun Jakarta hingga kini belum memiliki RS tanpa kelas yang dinilai lebih pro-rakyat, anti-diskriminatif, dan tidak membedakan kelas. Mengapa? Ini karena DKI mengalami kendala, salah satunya masih berhitung soal neraca keuangan masing-masing RS. "Masalahnya kan sekarang RS yang ada sudah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Senin (18/11).

Dia menambahkan, sebenarnya sudah ada upaya membentuk RS tanpa kelas di Jakarta. Tapi karena bentuk RS di BLUD perlu ada perhitungan keuangan di masing-masing RS. "Itu yang menjadi kendala pembentukan RS tanpa kelas," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Gembong, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah mengalokasikan dana sebesar Rp2,5 triliun untuk meng-cover biaya kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 5,1 juta jiwa pada 2020. Dengan demikian, itu bisa dinilai sebagai pengganti RS tanpa kelas. "Kita tetap mengedepankan layanan warga miskin," tandasnya.

Bahkan, kata Gembong, untuk mengkalkulasi RS tanpa kelas, setiap RS di Jakarta sudah menambah ruang Kelas III, dengan cara menurunkan Kelas VIP. Sehingga kebutuhan pasien tak mampu tetap terlayani oleh RS yang dituju. "Kita sudah minta ke Dinas Kesehatan DKI untuk menambah Kelas III," imbuhnya. Kalaupun tetap membangun RS tanpa kelas, kata lanjut Gembong, butuh regulasi yang matang. Setidaknya, membandingkan dengan faktor keuangan yang ada. "Faktor keuangan harus dihitung dengan regulasi yang ada," tandasnya.

Di tempat terpisah, Atom Kadam, kepala Promosi Kesehatan dan Humas RSUP Fatmawati menuturkan, pihaknya hanya sebatas pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan kesehatan. "Kami berikan sesuai standar layanan

kesehatan," ujarnya saat dikonfirmasi INDOPOS, Senin (18/11) siang.

Apakah kendala dalam pelayanan BPJS Mandiri Kelas III? Atom mengaku hingga kini

belum ada kendala bagi pasien BPJS Mandiri Kelas III yang terdampak akibat ruang rawat inap yang penuh. Bila tidak ada ruang rawat inap bagi pasien yang telah mendaftar, pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan RS lainnya.

Menurut Atom, langkah pertama yang dilakukan pihaknya berupa rujukan pasien ke RS lain yang terdekat dengan jarak RSUP Fatmawati. "Kalau penuh kita tetap carikan Kelas III. Jangan sampai kalau kita paksa naik Kelas II nanti membebaskan si pasien untuk membayar," ulasnya. Dalam koordinasi rujukan bakal dilakukan pihaknya tanpa membebaskan pihak pasien. Atom menambahkan, nantinya pasien hanya akan diberikan surat rujukan ke RS yang memiliki ruang rawat inap masih kosong. Di sisi lain, langkah yang sama tak akan dilakukan pihaknya jika mendapati pasien yang memerlukan penanganan medis Instalasi Gawat Darurat (IGD) ■

Bagi pasien IGD, kata Atom, pihaknya akan memberikan penanganan medis terlebih dahulu sebelum melakukan perujukan ke RS lainnya. "Kalau penuh biasanya kita kirim ke RS sekitar dengan standar pelayanan yang sama. Kalau dia (pasien, Red) masuknya dari IGD, kita tangani dulu lalu dirujuk," jelasnya.

Sedangkan sistem koordinasi rujukan yang dilakukan, kata Atom, merupakan cara teknis yang dilakukan setiap RS. Teknis ini disebut Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). "Jadi RS-nya menghubungi SPGDT ini. Bukan keluar-ganya yang menghubungi RS-nya. Karena yang mengajukan petugas medis yang menerima pun petugas medis. Jadi ada informasi-informasi medis yang disampaikan perujuk kepada yang dirujuk," katanya.

Di sisi lain, terkait pelayanan RS terhadap pasien baik yang menggunakan BPJS, asuransi maupun pembayaran tunai, pegawai di salah

satu RS swasta di Jakarta, Dewi, 35, menuturkan, semua pasien baik yang menggunakan BPJS, asuransi lain maupun bayar cash tetap terlayani dengan baik di RS. Namun aturannya lebih banyak jika yang memakai BPJS daripada yang menggunakan asuransi lain dan pembayaran tunai.

Sehingga terkadang, lanjut Dewi, pembayaran dari pihak BPJS ke rumah sakit yang suka telat. "Itu urusan bagian penagihan ya," katanya pada INDOPOS.

Untuk pasien yang menggunakan asuransi lain, lanjut Dewi, biasanya ada yang dibayarkan oleh perusahaan tempat si pasien bekerja--potong gaji. Jika yang dibayarkan oleh pemerintah biasanya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan untuk yang bayar sendiri menggunakan BPJS Mandiri. "Tapi persentasenya tidak tahu," ujarnya.

Menurut Dewi, untuk kuota tidak berkurang dan yang menggunakan BPJS pun tetap ramai. Biasanya, pasien yang menggunakan BPJS adalah pasien yang sakit saraf, penyakit dalam, semua spesialis pun menerima BPJS. Sedangkan UGD, Emergency pun tidak menolak pelayanan BPJS. Ini termasuk yang rawat inap, Kelas I, II, dan III maupun VIP. "Tergantung permintaan si pasien jika ingin naik VIP," ungkapnya.

Sementara itu, Corporate PR and Media Relations Siloam International Hospitals Tbk Jimmy Raming belum dapat dikonfirmasi oleh INDOPOS. Sama halnya Public Relation (PR) Rumah Sakit Pondok Indah dr Mindi belum dapat dikonfirmasi. "Kirimkan pertanyaan saja melalui email kami," kata perempuan cantik itu singkat usai ditemui INDOPOS.

Di tempat terpisah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya telah membangun dan memiliki RS tanpa kelas yang diberi nama RSUD Pakuhaji di bagian pantai pesisir utara (pantura). Pusat pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu di bagian utara daerah ini menelan anggaran sebesar Rp80 miliar. Pengoperasian RS tanpa kelas tersebut telah berjalan sejak 2018.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Jakarta Terbentur Regulasi

"Pembangunannya sudah rampung akhir 2017. Ini telah lama kami wacanakan, dan peruntukannya bagi masyarakat kurang mampu di bagian utara. Sebab di sana kondisi perekonomian masyarakatnya memang lemah," katanya saat dikonfirmasi, Senin (18/11).

Adapun konsep pembangunan RSUD Pakuhaji tanpa kelas itu, kata Zaki, tak lain untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat ekonomi lemah. Dan juga kawasan tersebut sangat jauh dari sarana dan prasarana kesehatan, khususnya RS. "Ini karena masyarakat pantura membutuhkan sekali RS daerah. Di sana ituarganya hanya bekerja sebagai nelayan dan petani, serta penghasilan mereka tidak cukup. Akses untuk berobat pun tidak ada, jadi kami bangun RSUD ini agar mereka dapat menikmati pelayanan kesehatan dari kami," paparnya.

Direktur RSUD Pakuhaji Corah menjelaskan, pihaknya menyediakan 200 kamar di empat gedung untuk melayani para pasien secara gratis. Bahkan RSUD Pakuhaji kini telah memiliki delapan poliklinik, lima ICU, tiga NICU, dan laboratorium. "Ada gedung perawatan, gawat darurat, perkantoran dan lab. Pasien yang datang cukup membawa KTP, KK, sama SKTM (surat keterangan tidak mampu). Semua biaya ditanggung sama Pemkab (Pemerintah Kabupaten Tangerang, Red), dan memang ini sangat membantu warga di pesisir utara Kabupaten Tangerang. RSUD ini masih Tipe B, makanya kalau ada pasien yang butuh pelayanan *emergency* pasti kami rujuk ke RSUD di Balaraja," tegasnya.

Sedangkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menyatakan, pihaknya bekerja sama dengan Yayasan Transformasi Bangsa membangun RS tanpa kelas yang diberi nama Rumah Indonesia Sehat (RIS) Hospital. Adapun kucuran dana untuk melakukan pelayanan pengobatan gratis dengan RS swasta ini setiap tahun mencapai Rp80 miliar.

Alasan kerja sama dengan swasta itu dilakukan lantaran APBD yang dimiliki tak mumpuni meng-cover ribuan pasien tidak mampu di kota tersebut.

"Konsepnya semua pasien diperlakukan sama, tidak ada Kelas VIP, Kelas I, II atau III, semua kamar perawatan memiliki tarif yang sama. Biaya untuk berobat jalan dan rawat inap dapat ditekan serendah mungkin. Kami lakukan kerja sama ini karena APBD yang ada minim sekali, tidak bisa dipungkiri masalah kesehatan sangat penting untuk warga," ujarnya.

Direktur RIS Hospital Bambang Susanto berpendapat, tujuan utama pihaknya bekerja sama dengan Pemkot Tangsel membangun RS tanpa kelas ini untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu yang baik dengan tarif yang terjangkau. Ini terutama bagi masyarakat yang kurang mampu di Tangsel. Sampai saat ini pihaknya telah melayani kurang lebih 30 ribu pasien kurang mampu dengan fasilitas yang dimiliki. Seperti 400 kamar rawat inap, sejumlah dokter, bidan, dan delapan poliklinik serta laboratorium sederhana dan rontgen.

"Dengan konsep pelayanan dan fasilitas setara dengan klinik swasta dan sangat terjangkau untuk warga, kami punya CSR (Corporate Social Responsibility) yang dapat dialokasikan untuk membiayai pengobatan pasien kurang mampu. Kami senang dapat membantu warga tidak mampu untuk berobat gratis di sini," imbuhnya.

Senada diutarakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Kata dia, rintisan RS tanpa kelas itu telah dilakukan sejak 2013. Pihaknya memperluas bangunan RSUD hingga di kawasan Jalan Pramuka menuju Jalan Raya Mayor Oking. RS tanpa kelas tersebut diberi nama RSUD dr Chasbullah Abdulmajid. Adapun konsep pembangunan RS tanpa kelas itu tak lain pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa membeda-bedakan sosial ekonomi maupun agama, suku, dan lainnya.

"Jadi tidak ada diskriminatif lagi,

tanpa membedakan kelas-kelas yang ada. Dari kalangan ekonomi lemah pun akan mendapat pelayanan yang sama. Kami berikan kemudahan bagi semua pasien. Mereka cukup daftar melalui online untuk rawat inap, dan kami sediakan jasa pengantaran obat secara gratis," jelasnya.

Kusnanto Saidi, direktur RSUD dr Chasbullah Abdulmajid mengaku untuk memberikan pelayanan gratis itu pihaknya menyediakan 200 ruang rawat inap di delapan lantai gedung RSUD tersebut. Dirinya memproyeksikan 1.600 kamar tersebut dapat menampung 60 persen pasien miskin, dan 40 persen Kelas II dan I. Artinya, tarif jasa untuk pelayanan rawat inap, jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tindakan, operasi, pemeriksaan, seluruhnya disamakan bagi semua kamar.

Perlu diketahui, sejumlah daerah yang sudah menerapkan konsep RS tanpa kelas di antaranya Kabupaten Kulonprogo, Kota Jogjakarta, Kota Pontianak, Lampung, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Cianjur, Cirebon, Sukabumi, Bali—dalam persiapan—, dan sebagainya. (dny/ibl/cok)